



Data Kemiskinan Belum Sinkron

UMBULHARJO (MERAPI) - Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta ditargetkan berkurang dari 7,7 persen menjadi 7,1 persen. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Salah satu persoalan yang disorot dalam penanggulangan kemiskinan adalah data kemiskinan yang berbeda antara Kota Yogyakarta dan pemerintah pusat sehingga harus disinkronkan.

"Yang masih perlu ditindaklanjuti, bagaimana mensinkronkan data kemiskinan Kartu Menuju Sehat (KMS) versi pemkot dan data basis data terpadu (BDT) dari Kemensos, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan di Kota Yogyakarta," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, Selasa (6/3).

Menurut Fokki, perbedaan data itu karena pendekatan dan komponen serta indikator kemiskinan yang digunakan Pemkot Yogyakarta dan pemerintah pusat, berbeda. Data KMS tahun 2018 warga miskin 55.094 jiwa dan BDT Kemensos RI tercatat 129.000 warga berkejahteraan ke bawah. Saat disandingkan dengan data KMS yang masuk BDT sebesar 33.433 jiwa. "Itu yang akan dicari sinkronisasinya dan program intervensi apa yang akan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan kota," tambahnya.

Komisi D DPRD Kota Yogyakarta juga berharap pemerintah memiliki sistem informasi terpadu yang berisi data warga miskin secara menyeluruh. Termasuk permasalahan yang dialami sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan tepat sasaran. Dia menuturkan dalam rapat bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta, untuk sinkronisasi data KMS dan BDT maka melalui Dinas Komunikasi dan Persandian akan membuat Sistem Informasi Terpadu dengan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Dengan sistem informasi terpadu, diharapkan nantinya ada data tunggal di Kota Yogyakarta berdasarkan *by name*, *by address* dan *by problem* untuk menentukan program aksi intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," papar Fokki.

Secara terpisah Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menyatakan, sasaran program pengentasan kemiskinan didasarkan pada data warga miskin pemegang KMS dan warga miskin yang masuk BDT dari Kemensos. Diakui ada warga penerima KMS yang masuk dalam BDT Kemensos. "Setelah kami sisir memang ada warga pemegang KMS yang masuk di basis data terpadu pusat. Kami akan lakukan validasi dan verifikasi lagi agar data sinkron," imbuh Edy.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005